

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, memiliki 20 kecamatan yang terdiri 7 kelurahan dan 206 desa. Kecamatan Tapung adalah kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 23 desa, diikuti Tapung Hulu dengan 18 desa dan XIII Koto Kampar dengan 1 kelurahan dan 17 desa. Sedangkan kecamatan yang jumlah kelurahan/desa terkecil adalah Kecamatan Bangkinang dengan 2 desa dan 2 kelurahan, Perhentian Raja dengan 4 desa diikuti Kecamatan Gunung Sahilan dengan 5 desa (Kampar Dalam Angka Tahun 2010).

Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan memiliki peran yang sangat besar dalam mempercepat pembangunan suatu wilayah, baik ditinjau dari aspek keruangan, sosial ekonomi, lingkungan dan manajemen pemerintahan serta sumberdaya manusia. Kepentingan desa sebagai unit terkecil administrasi pemerintahan memberikan konsekuensi perlunya pengembangan wilayah dengan berbasis pada potensi ekonomi kawasan pedesaan. Karena itu potensi ekonomi kita berada di daerah pedesaan, dan untuk meningkatkan produksi dan

pendapatan nasional, maka pembangunan perekonomian di daerah pedesaan perlu mendapat perhatian yang khusus.

Dalam mendorong pembangunan daerah Kabupaten Kampar, diperlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang khusus menunjang pembangunan dengan memobilisasi dana yang ada di daerah pedesaan dan menyalurkan pinjaman untuk membiayai pembangunan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi pedesaan harus didukung oleh faktor lain seperti peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, perbaikan aksesibilitas prasarana wilayah, akses informasi dan komunikasi serta akses terhadap sarana dan perekonomian desa. Melalui upaya tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan pertumbuhan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan pemerintah desa.

Tuntutan dukungan sarana dan prasarana lain untuk mengembangkan perekonomian desa, dihadapkan pada adanya keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga potensi sumberdaya ekonomi yang ada di pedesaan belum dapat dikelola secara maksimal. Hal ini berpengaruh terhadap menurunnya minat pencari kerja untuk menetap di desa akibat terbatasnya peluang dan kesempatan kerja, dan adanya harapan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar di daerah perkotaan.

Dengan adanya kesenjangan tersebut, semakin meningkatkan laju perpindahan penduduk, arus modal dan sumberdaya dari desa ke kota,

sehingga kemampuan desa untuk membangun dirinya sendiri semakin lama semakin rendah dan bahkan akan semakin jauh dari upaya untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan penduduk di pedesaan.

Banyak data yang menunjukkan bahwa suatu desa jika dilihat dari potensi sumberdaya alam sangat kaya, namun tingkat pendapatan masyarakat dan ekonomi wilayah sangat rendah, yang diakibatkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi dan lemahnya permodalan di tingkat petani. Sementara itu, risiko proses produksi sangat besar karena ketergantungan dan pengaruh yang besar dari alam, seperti: curah hujan, banjir, perubahan suhu, ombak besar, dan lain-lain.

Salah satu kendala utama dalam pengembangan ekonomi desa termasuk desa di Kabupaten Kampar adalah terbatasnya lembaga keuangan di pedesaan, selain faktor seperti kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya (enterpreneurship), ketersediaan infrastruktur pendukung (sarana dan prasarana produksi), dan faktor lainnya, sehingga memperlambat geliat kegiatan ekonomi masyarakat dan desa. Implikasinya mengakibatkan adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja, kesempatan usaha maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan realitas wilayah pedesaan yang demikian, maka perlu adanya terobosan yang bersifat merangsang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, antara lain dengan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Memperhatikan keadaan dan perubahan pembangunan pedesaan dewasa ini beserta tantangan-tantangan yang ada, sangat perlu dipersiapkan strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan yang mengedepankan demokratisasi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini mengingat selama pemerintahan masa lalu terjadi proses marginalisasi demokrasi dan partisipasi masyarakat perdesaan yang dianggap hanya sebagai objek pembangunan semata. Kebijakan pembangunan pedesaan seperti dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mengakibatkan adanya kelembagaan masyarakat dan kelompok-kelompok lokal melalui penyeragaman bentuk dan strukturnya.

Dalam bidang pembangunan pedesaan di Kabupaten Kampar, pendekatan penyuluhan pembangunan yang selama ini diterapkan adalah pendekatan kelompok, karena kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadi wahana belajar dan kemajuan yang bergerak secara mandiri. Akan tetapi, pembentukan kelompok-kelompok tersebut pada umumnya dibentuk dari atas (*top down*) dan hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan pemerintah. Dengan alasan percepatan pembangunan, kelompok-kelompok tradisional yang sebelumnya eksis diformalkan bentuk dan strukturnya. Terjadilah proses defungsionalisasi kelembagaan masyarakat

sehingga hampir tidak ada lagi lembaga masyarakat yang berdaya menghadapi arus penyeragaman yang dimobilisasi sedemikian rupa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan Undang Undang Otonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Undang Undang No. 22 tersebut hendaknya dapat menjadikan lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok lokal yang selama ini 'mati suri' dapat kembali berperan. Dalam upaya mewujudkan suatu proses pembangunan desa berkelanjutan yang partisipatif, pemerintah desa bersama-sama masyarakat dapat melakukan revitalisasi lembaga-lembaga lokal yang sebelumnya tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Dengan adanya berbagai fakta seperti diungkapkan merupakan latar belakang yang menerangkan betapa pentingnya penelitian Revitalisasi dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Kerangka Pembangunan Desa Partisipatif Berkelanjutan di Kabupaten Kampar ini dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian jangka panjang (3 tahun). Pada tahun pertama direncanakan diperoleh profil kelembagaan desa dan kelompok-kelompok lokal yang bisa dijadikan BUMDes. Sedangkan tahun-tahun berikutnya menyusun rancangan model revitalisasi dan pemberdayaan BUMDes serta penerapan model BUMDes di daerah pedesaan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil berbagai kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, dan kelompok-kelompok lokal yang berpotensi untuk dijadikan BUMDes?
- 2) Bagaimana model BUMDes yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan perdesaan yang berkelanjutan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini dimaksudkan mengkaji keberadaan kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, dan kelompok-kelompok lokal yang berpotensi untuk dijadikan BUMDes dan ditindaklanjuti melalui kegiatan revitalisasi pemberdayaan kelembagaan dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data dan informasi profil berbagai kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, dan kelompok-kelompok lokal yang berpotensi untuk dijadikan BUMDes.
- 2) Tersusunnya model BUMDes yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

- 3) Terwujudnya BUMDes sebagai kelas belajar mengajar, unit produksi, dan wahana kerjasama bagi para anggotanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, dalam setiap tahapan proses pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pertama dan kedua diharapkan dapat dicapai pada tahun pertama. Untuk tujuan ketiga, dan keempat diharapkan dapat dicapai pada tahun kedua dan ketiga.